



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kelas D yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Pratama Kelas D adalah UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara fungsional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Direktur Rumah Sakit Pratama Kelas D yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Pratama Kelas D Kabupaten Sambas yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberi tugas tambahan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Pratama Kelas D Kabupaten Sambas.
- (2) Rumah Sakit Pratama Kelas D Kabupaten Sambas sebagaimana pada ayat (1) berada di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Pratama Kelas D merupakan UPTD pada Dinas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit pelayanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Pratama Kelas D dipimpin oleh Direktur, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Rumah Sakit Pratama Kelas D sebagaimana pada ayat (2) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Rumah Sakit Pratama Kelas D mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Pratama Kelas D menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan serta perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- d. penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;

- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Pratama Kelas D; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya;

## BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Pratama Kelas D terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - d. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Pratama Kelas D sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Direktur

#### Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pimpinan yang memiliki tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Pratama Kelas D berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
  - a. penyusun rencana kerja Rumah Sakit Pratama Kelas D;
  - b. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan bidang pelayanan medis yang meliputi medik umum, gawat darurat, keperawatan, laboratorium pratama, radiologi, farmasi, rawat jalan, pelayanan intensif dan rawat inap;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penunjang medis dan non medis;

- d. pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan keperawatan meliputi mutu asuhan keperawatan/kebidanan dan logistik keperawatan;
- e. pelayanan dan pengelolaan urusan tata usaha umum, perlengkapan kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi, tatalaksana dan rekam medik;
- f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, rekam medik dan penyusunan laporan Rumah Sakit Pratama Kelas D.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan data dan program Rumah Sakit Pratama Kelas D dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin, mengkoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana;
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
- e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Rumah Sakit Pratama Kelas D;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah dilingkungan Rumah Sakit Pratama Kelas D;
- h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pratama Kelas D; dan
- i. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan komite medik, komite keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi;

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalansi rawat inap, UGD, poliklinik, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, penyusunan tata kerja, dan melaksanakan koordinasi penunjang mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kelima  
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan koordinasi peningkatan kualitas SDM, pemeliharaan, pemantauan, pendistribusian peralatan penunjang medik, dan pelaksanaan koordinasi penunjang mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Penunjang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Setiap Pimpinan dalam unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta menumbuh kembangkan budaya kerja.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Pratama Kelas D wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk serta kebijakan kerja kepada bawahannya.
- (5) Direktur dan seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap pimpinan unit kerja agar mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (8) Direktur wajib menyampaikan laporan kinerja Rumah Sakit Pratama Kelas D kepada Kepala Dinas.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Pendanaan di Rumah Sakit Pratama Kelas D bersumber dari:
  - a. Penerimaan Rumah Sakit;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
  - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Pratama Kelas D bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Rumah Sakit Pratama Kelas D dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas.

- (4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Jabatan perangkat Daerah di bawah jabatan Direktur tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Uraian Tugas Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 3 September 2019

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 3 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 30



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001

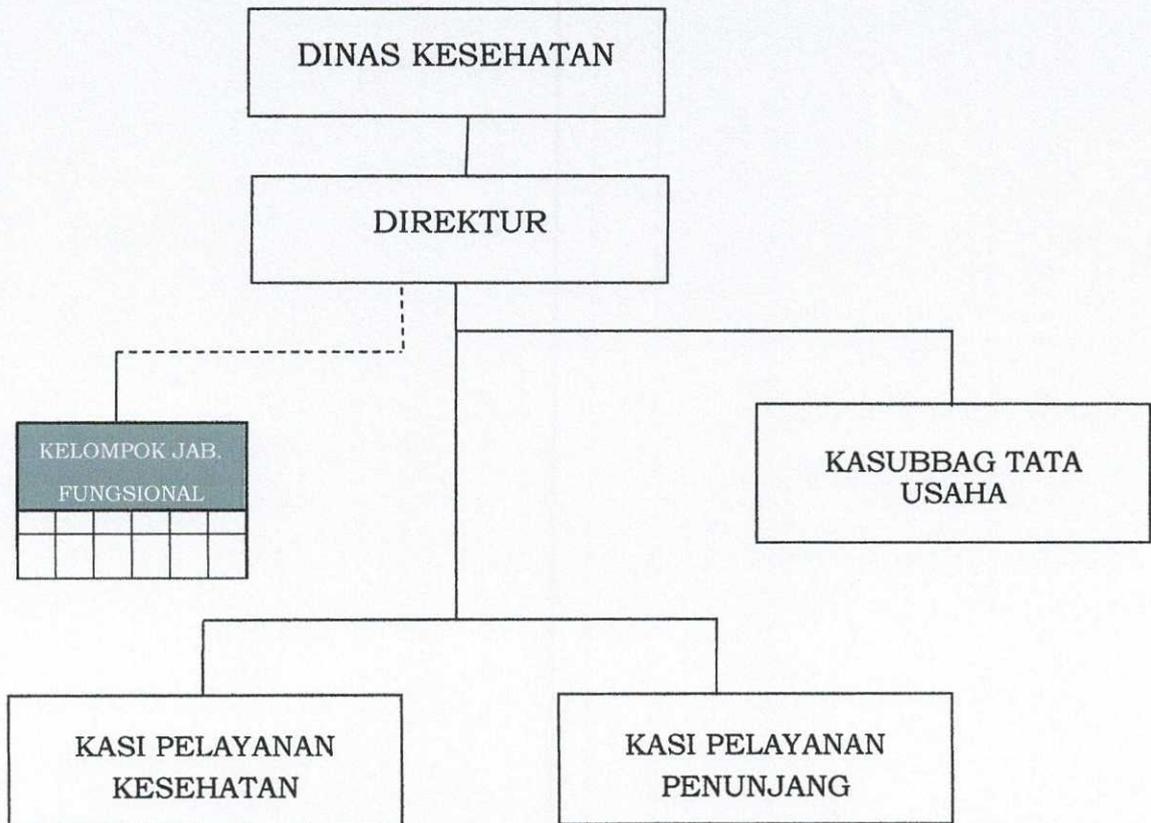
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 30 TAHUN 2019

TANGGAL 3 SEPTEMBER 2019

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001